

2022



**LKPJ**  
**LAPORAN**  
**KETERANGAN**  
**PERTANGGUNG**  
**JAWABAN**

**Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Tanah Laut**

Jl. H. Boejasin No.09 Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21098

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia Nya Sehingga Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang - Undang RI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 Ayat (1) Mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD Dinas Kesehatan Tanah Laut merupakan sebuah laporan yang memuat penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategi ( RENSTRA)

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat.

Semoga upaya kita mendapat Rahmad, Hidayah dan Ridha Nya. Aamiin.

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut,



**dr. Hj. Isna Farida, M.Kes**  
NIP. 19740612 200501 2 016

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.2 Visi dan Misi Daerah.....	3
1.3 Data Umum Daerah.....	3
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....</b>	<b>17</b>
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	17
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	22
3.2 Kebijakan Strategi yang Ditetapkan.....	28
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya .....	29
<b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>39</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan .....	2
Tabel 1.2 Komposisi Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	9
Tabel 1.3 Komposisi Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Angka Pertumbuhan Penduduk .....	10
Tabel 1.4 Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan .....	10
Tabel 1.5 Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan Tahun 2022 .....	11
Tabel 1.6 Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPT menurut tingkat pendidikan tahun 2022 .....	12
Tabel 1.7 Realisasi Pendapatan Tahun 2022 .....	14
Tabel 1.8 Realisasi Belanja Tahun 2022.....	15
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama .....	18
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama.....	19
Tabel 3.3 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	22
Tabel 3.4 Tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanah laut .....	29
Tabel 4.1 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022.....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Hukum**

#### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Kabupaten Tanah Laut dibentuk dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tanah Laut berkedudukan di Pelaihari dan terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pelaihari, Jorong, Bati-Bati, Kurau dan Takisung.

Pada era desentralisasi dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000 berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999, diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, maka beberapa peran pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah Daerah sebagai kewenangan wajib dan tugas pembantuan, salah satunya bidang pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu unit kerja yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berdasar Peraturan Bupati Tanah Laut No. 24 Tahun 2009.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan maka perlu Mengevaluasi tugas pokok tersebut dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan (LKPJ) dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD.

#### **b. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 memiliki 40 (empat puluh) perangkat daerah dan 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) unit kerja perangkat daerah. Dalam tabel dibawah ini disampaikan secara terperinci jumlah perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 1.1 Daftar Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan

No	Perangkat Daerah
1	Dinas Kesehatan
2	RSUD H.Boejasin
3	RSUD KH. Mansyur Kintap
4	UPT Laboratotium Kesehatan
5	UPT Instalasi Farmasi
6	UPT Puskesmas Pelaihari
7	UPT Puskesmas Asam-Asam
8	UPT Puskesmas Batakan
9	UPT Puskesmas Bati-Bati
10	UPT Puskesmas Jorong
11	UPT Puskesmas Kait-Kait
12	UPT Puskesmas Kintap
13	UPT Puskesmas Kurau
14	UPT Puskesmas Padang Luas
15	UPT Puskesmas Panyipatan
16	UPT Puskesmas Sungai Cuka
17	UPT Puskesmas Sungai Riam
18	UPT Puskesmas Tajau Pecah
19	UPT Puskesmas Takisung
20	UPT Puskesmas Tambang Ulang
21	UPT Puskesmas Tanjung Habulu
22	UPT Puskesmas Tirtajaya
23	UPT Puskesmas Angsau
24	UPT Puskesmas Bumi Makmur

25	UPT Puskesmas Durian Bungkok
26	UPT Puskesmas Bentok Kampung

## 1.2 Visi dan Misi Daerah

### a. Visi Daerah

**“MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI  
(BERkarya, INovasi, TERTata, RELIGIUS, AKTUAL, dan SINERGI)”**

### b. Misi Daerah

Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yaitu: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terkait dengan Misi (1) Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

## 1.3 Data Umum Daerah

### a. Data Geografis Daerah

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut yang beribukota Pelaihari berada di bagian selatan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi 114°30'20" - 115°20'00" Bujur Timur dan 3°30' 33" - 4°10' 30" Lintang Selatan.

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai 3.631,35 km<sup>2</sup> (363.135 Ha) atau 9,17% dari luas wilayah Kalsel. Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi

sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka luas total luas wilayah menjadi 449.730 Ha atau 4.497,3 km<sup>2</sup>. Adapun batas administrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Utara : Kota Banjarbaru
- Selatan : Laut Jawa
- Timur : Kabupaten Tanah Bumbu
- Barat : Laut Jawa

Ditinjau dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari arah Selatan (Pantai Laut Jawa) ke arah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung didaerah pedalaman yang berbatas dengan Kabupaten Banjar. Secara umum dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat di bagi atas 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1. Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berombak. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara sungai dan Pantai Laut Jawa.
2. Bagian utara, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu:
  - Puncak gunung Kemuning (750 m dpl)
  - Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl)
  - Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl)
  - Puncak Gunung Kematian (951 m dpl)
  - Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl)
  - Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl)
  - Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl)
  - Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl)
  - Puncak Gunung Condong (553 m dpl)

Dilihat dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi , yaitu kelas 0 – 7 meter, 7 - 25 meter, 25 - 100 meter, 100 - 500 meter, 500 – 1000 meter dan diatas 1000 meter.

Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas di Kabupaten Tanah Laut adalah kelas elevasi 0 - 7 meter dpl, yaitu mencapai 58.240 Ha (15.6 % dari luas daratan).



Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 meter dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan). Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Kemudian kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya semakin peka tanah terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. 0 - 3 %, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan).
2. 3 – 8 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 % dari luas total daratan).
3. 8 – 15 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47 % dari luas total daratan).
4. 15 – 25 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85 % dari luas total daratan).
5. 25 – 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87 % dari luas total daratan).
6. 40 % sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 13.545 Ha (3,63 % dari luas total daratan).

Wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0 – 3% yaitu sebesar 67,16% dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

Berdasarkan tinjauan terhadap peta geologi Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut berumur antara mesozoik, tersier dan kuartar. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan

dibagian Selatan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pratersier, sedangkan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.

Morfologi wilayah di Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu satuan morfologi dataran, dataran bergelombang, perbukitan dan pegunungan. Satuan morfologi dataran menempati bagian ujung Selatan dan ujung Barat. Ketinggian berkisar antara 0 – 10 m dpl. Satuan ini berupa endapan alluvium rawa dan pantai yang tersusun dari batuan sediment kwarter. Satuan Morfologi Dataran Bergelombang menempati bagian Barat dan Selatan, yaitu sekitar jalur jalan raya Bati-bati, Pelaihari, Asam-asam, Pelaihari – Batakan dan Pelaihari – Takisung.

Ketinggian berkisar antara 10 – 50 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan sediment kwarter dan tersier. Satuan Morfologi Perbukitan menempati bagian tengah merupakan kaki dari Pegunungan Meratus. Ketinggian berkisar antara 50 – 250 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan metamorf dan sediment serta sebagian kecil batuan beku. Satuan Morfologi Pegunungan menempati bagian Utara, dicirikan oleh lereng yang terjal dengan ketinggian puncak lebih dari 250 m dpl. Beberapa puncaknya seperti Gunung Kematian (951 m dpl), Gunung Batu Belerang (921 m dpl), Gunung Batu Karo (621 m dpl).

Jenis Tanah yang ada di Wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleisol. Yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Laotosol. Sedangkan jenis tanah Gleisolhanya sebagian kecil saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

1. Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organik 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5 – 6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhan tanah ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).
2. Jenis tanah Alluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsure haranya relative kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika

kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).

3. Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangat masam yaitu 4 – 5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregatnya kurang baik, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitasnya adalah rendah sampai sedang, menempati areal satuan 123.010 Ha (32,98% dari total daratan).

Wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki tekstur tanah dengan klasifikasi yaitu tekstur halus (lempung berliat hingga liat), tekstur sedang (lempung sampai lempung liat berdebu) dan tekstur kasar (lempung berpasir sampai berkerikil). Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.

Umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah alluvial, latosol dan podsolik yaitu 297.285 Ha (79,91 % dari luas total daratan), tanah bertekstur halus meliputi jenis tanah gleisol dan podsonik seluas 46.750 Ha (12.54 % dari luas total daratan) dan tanah yang bertekstur kasar meliputi jenis tanah alluvial seluas 28.915 Ha (7.75 % dari luas total daratan). Dengan demikian, di Kabupaten Tanah laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha (7.75% dari luas total daratan) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatas tekstur tanah yang kasar.

Kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut di klasifikasikan kedalam 4 (empat) kelas kedalaman efektif tanah yaitu dalam (lebih dari 90 cm) sedang (80 – 90 cm), dangkal (30 – 60 cm) dan sangat dangkal (kurang dari 30 cm). Kedalaman efektif tanah akan berpengaruh terhadap wilayah perakaran tanaman, jenis tanaman/tumbuhan dan tegakan tanaman.

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan Desember – Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni – Agustus. Berdasarkan hasil penelitian antara 1915 – 1941, curah hujan bagian Timur/pantai sebesar 2,324 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 150 hari/tahun

dan di bagian Barat sampai dengan perbatasan kabupaten. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 3.000 mm/tahun dan di wilayah Timur berkisar antara 2.000 – 2.500 mm/tahun.

Data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspirasi bulanan menyebabkan Kabupaten Tanah laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang water balance nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air.

Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Sungai atau Danau : Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km<sup>2</sup>), Sungai Tabanio (770 Km<sup>2</sup>), Sungai Sabuhur (190 Km<sup>2</sup>), Sungai Swarangan (580 Km<sup>2</sup>). Fungsi-fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara daerah-daerah timur dengan daerah-daerah Barat di Kabupaten Tanah Laut. Adapun danau-danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu Rawa Benua Raya (6.600 Ha), Rawa Panjaratan (2.500 Ha) dan Rawa Sanipah (5.600 Ha). Pada musiman hujan terdapat wilayah yang terkena banjir, baik terus menerus tergenang maupun tergenang secara periodik. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan.
2. Air Tanah : Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. Wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletak pada ketinggian 0–1000 m dpl. Oleh sebab itu kedalaman air tanahnya kan bervariasi, dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

#### **b. Jumlah Penduduk**

Dilihat dari aspeknya penduduk mempunyai hubungan timbal balik dengan pembangunan. Penduduk Kabupaten Tanah Laut berperan sebagai subyek dan obyek dari pembangunan itu sendiri. Sebagai subyek pembangunan, maka penduduk dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya sebagai obyek pembangunan, penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan menerima segala konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Adapun jumlah Penduduk Tanah Laut Semester I Tahun 2022 (data hasil integrasi dengan pemerintah pusat adalah 353.190 jiwa yang terdiri dari 179.610 laki-laki dan 173.580 perempuan dan masih tampak bahwa penyebaran Penduduk masih bertumpu di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah penduduk 78.793 jiwa kemudian diikuti Kecamatan Bati-bati 44.712 jiwa dan Kecamatan Kintap 43.073 Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah penduduk 14.057 jiwa.

Tabel 1.2 Komposisi Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Takisung	16.663	16.228	32.891
2	Jorong	17.762	16.684	34.446
3	Pelaihari	39.750	39.043	78.793
4	Kurau	7.147	7.031	14.178
5	Bati Bati	22.698	22.014	44.712
6	Panyipatan	12.745	12.590	25.335
7	Kintap	22.126	20.947	48.073
8	Tambang Ulang	9.400	9.107	18.507
9	Batu Ampar	14.273	13.560	27.833
10	Bajuin	9.928	9.437	19.365
11	Bumi Makmur	7.118	6.939	14.057
<b>JUMLAH</b>		<b>179.610</b>	<b>173.580</b>	<b>353.190</b>

### c. Pertumbuhan Penduduk

Adapun Pertumbuhan Penduduk Tanah Laut Semester I Tahun 2022 (data hasil integrasi dengan pemerintah pusat adalah 353.190 jiwa yang terdiri dari 179.610 laki-laki dan 173.580 perempuan dan masih tampak bahwa penyebaran Penduduk masih bertumpu di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah penduduk 78.793 jiwa kemudian diikuti Kecamatan Bati-bati 44.712 jiwa dan Kecamatan Kintap 43.073 Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah penduduk 14.057 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk semester II Tahun 2021 adalah 348.505 jiwa dengan penyebaran penduduk di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah penduduk 78.001 jiwa kemudian diikuti Kecamatan Bati-Bati 44.156 jiwa dan Kecamatan Kintap 42.423 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bumi makmur dengan jumlah penduduk 13.920 jiwa.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Angka Pertumbuhan Penduduk

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin			
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Penduduk Sekarang (Jiwa)	Penduduk Semester II 2021 (Jiwa)
1	Takisung	16.663	16.228	32.891	32.561
2	Jorong	17.762	16.684	34.446	33.786
3	Pelaihari	39.750	39.043	78.793	78.001
4	Kurau	7.147	7.031	14.178	13.963
5	Bati Bati	22.698	22.014	44.712	44.156
6	Panyipatan	12.745	12.590	25.335	25.009
7	Kintap	22.126	20.947	48.073	42.423
8	Tambang Ulang	9.400	9.107	18.507	18.166
9	Batu Ampar	14.273	13.560	27.833	27.333
10	Bajuin	9.928	9.437	19.365	19.187
11	Bumi Makmur	7.118	6.939	14.057	13.920
<b>JUMLAH</b>		<b>179.610</b>	<b>173.580</b>	<b>353.190</b>	<b>348.505</b>

#### d. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut memiliki pegawai sebanyak 64 orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 64 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 4 orang, Kepala Sub Bagian (Pejabat Pangawas) sebanyak 3 orang dan staf pelaksana sebanyak 55 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4 Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			4			4
4	Kepala Sub Bagian				3		3
6	Staf PNS/Pelaksana					55	55
	<b>JUMLAH</b>						64

Sumber : Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

Keberadaan sumber daya manusia kesehatan sebagai salah satu pendukung utama pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan pelayanan kesehatan baik melalui institusi puskesmas maupun yang langsung berhubungan dengan Dinas Kesehatan.

a. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.5 Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan Tahun 2022

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	1	12	7		20
3	Bidang Pelayanan Kesehatan	4	6	1		11
4	Bidang P2P	1	10	1		12
5	Bidang Kesehatan Masyarakat	1	7	1		9
6	Bidang Sumber Daya Kesehatan	2	8	1		11
7	UPT. RSUD H. Boedjasin	33	179	46	2	260
8	UPT. RS K.H.Mansyur Kintap	1	34	33		68
9	UPT Labkes		4	2		6
10	UPT IFK	2	8	2		12
11	UPT Puskesmas Pelaihari	5	47	8		60
12	UPT Puskesmas Angsau	3	27	8		38
13	UPT Puskesmas S. Riam		17	7		24
14	UPT Puskesmas Panyipatan		15	7		22
15	UPT Puskesmas Batakan		10	6		16
16	UPT Puskesmas Takisung		23	4		27

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
17	UPT Puskesmas Jorong	1	20	6		27
18	UPT Puskesmas Asam-Asam	4	15	10		29
19	UPT Puskesmas Kintap	1	23	5		29
20	UPT Puskesmas Sei Cuka		15	4		19
21	UPT Puskesmas Tajau Pecah		26	10		36
22	UPT Puskesmas T. Ulang	2	18	5		25
23	UPT Puskesmas Bati-Bati	2	25	5		32
24	UPT Puskesmas Kait-Kait	2	12	6		20
25	UPT Puskesmas Kurau		16	7		23
26	UPT Puskesmas Padang Luas		12	9		21
27	UPT Puskesmas Tirta Jaya	1	28	2		31
28	UPT Puskesmas T. Habulu		11	9		20
29	UPT Puskesmas B. Makmur		15	12		27
30	UPT Puskesmas Bentok Kampung		16	3		19
31	UPT Puskesmas Durian Bungkok		12	5		17

Sumber : Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

- b. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPT menurut tingkat pendidikan tahun 2022



No	Unit Kerja	Golongan						Jmlh
		S-2	S-1	DIII	SMA	SMP	SD	
1.	Kepala Dinas	1						1
2.	Sekretariat		7	9	4			20
3.	Bidang Pelayanan Kesehatan		6	5				11
4.	Bidang P2PL	1	6	5				12
5.	Bidang Kesehatan Masyarakat	1	5	3				9
6.	Bidang Sumber Daya Kesehatan	2	2	6	1			11
7.	UPT. RSUD H. Boedjasin	26	77	146	7	2	2	260
8.	UPT. RS K.H.Mansyur Kintap	1	26	41				68
9.	UPT Labkes		1	3	2			6
10.	UPT IFK		6	6				12
11.	UPT Puskesmas Pelaihari	2	15	40	3			60
12.	UPT Puskesmas Angsau		11	25	2			38
13.	UPT Puskesmas S. Riam		6	18				24
14.	UPT Puskesmas Panyipatan		5	15	2			22
15.	UPT Puskesmas Batakan		9	6	1			16
16.	UPT Puskesmas Takisung		8	18	1			27
17.	UPT Puskesmas Jorong	1	3	22	1			27
18.	UPT Puskesmas Asam-Asam		6	21	2			29
19.	UPT Puskesmas Kintap		9	18	2			29

No	Unit Kerja	Golongan						Jmlh
		S-2	S-1	DIII	SMA	SMP	SD	
20	UPT Puskesmas Sei Cuka	1	5	11	2			19
21	UPT Puskesmas Tajau Pecah		9	24	3			36
22	UPT Puskesmas T. Ulang		8	16	1			25
23	UPT Puskesmas Bati-Bati	1	10	18	2	1		32
24	UPT Puskesmas Kait-Kait		5	14	1			20
25	UPT Puskesmas Kurau		5	16	2			23
26	UPT Puskesmas Padang Luas		4	15	2			21
27	UPT Puskesmas Tirta Jaya		9	17	5			31
28	UPT Puskesmas T. Habulu		4	15	1			20
29	UPT Puskesmas B. Makmur	1	5	21				27
30	UPT Puskesmas Bentok Kampung		6	12	1			19
31	UPT Puskesmas Durian Bungkok		4	12	1			17

Sumber : Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

#### e. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri dari Retribusi daerah dan Lain-Lain PAD yang sah dan alokasi anggaran pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp 102.740.333.188 dengan Realisasi sebesar Rp 93.633.469.254 dan capaian persentase sebesar 91,14%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.7 Realisasi Pendapatan Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Daerah	120.000.000	65.200.000	54,33 %

2	Lain-Lain PAD yang Sah	102.620.333.188	93.568.269.254	91,18%
<b>Jumlah</b>		<b>102.740.333.188</b>	<b>93.633.469.254</b>	<b>91,14%</b>

Sumber : Laporan realisasi anggaran Aplikasi SIPD s.d 31 Desember 2022

#### f. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang alokasi anggaran belanja daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp 450.120.221.110 dengan Realisasi sebesar Rp 355.425.470.790 dan capaian persentase sebesar 78,96%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.8 Realisasi Belanja Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>338.477.094.295</b>	<b>278.893.087.500</b>	<b>82,40%</b>
1	Belanja Pegawai	118.492.691.806	103.349.013.245	87,22%
2	Belanja Barang dan Jasa	219.984.402.489	175.544.074.255	79,80%
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>111.643.126.815</b>	<b>76.532.383.290</b>	<b>68,55%</b>
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.451.250.611	49.553.142.376	62,37%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.748.084.202	25.641.327.743	83,39%
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.427.292.002	1.268.012.171	88,84%
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.500.000	14.925.000	90,45%
<b>Jumlah</b>		<b>450.120.221.110</b>	<b>355.425.470.790</b>	<b>78,96%</b>

Sumber : Laporan realisasi anggaran Aplikasi SIPD s.d 31 Desember 2022

## BAB II

### PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 134 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2022 setelah perubahan pendapatan dianggarkan sebesar Rp 102.740.333.188 dengan Realisasi sebesar Rp 93.633.469.254 dan capaian persentase sebesar 91,14% dan belanja dianggarkan sebesar Rp 450.120.221.110 dengan Realisasi sebesar Rp 355.425.470.790 dan capaian persentase sebesar 78,96% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT  
DINAS KESEHATAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022  
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4/3) * 100	6
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>102.740.333.188</b>	<b>93.633.469.254,01</b>	<b>91,14</b>	<b>110.497.681.104,47</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	120.000.000	65.200.000,00	54,33	103.019.600,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	0	0,00	0,00	1.120.950,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	120.000.000	65.200.000,00	54,33	101.899.600,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	102.620.333.188	93.568.269.254,01	91,18	110.394.661.504,47
4.1.04.10	Pendapatan BLUD	102.620.333.188	93.568.269.254,01	91,18	110.394.661.504,47
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>102.740.333.188</b>	<b>93.633.469.254,01</b>	<b>91,14</b>	<b>110.497.681.104,47</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>102.740.333.188</b>	<b>93.633.469.254,01</b>	<b>91,14</b>	<b>110.497.681.104,47</b>
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>450.120.221.110</b>	<b>355.425.470.790,92</b>	<b>78,96</b>	<b>373.380.998.487,29</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>338.477.094.295</b>	<b>278.893.087.500,92</b>	<b>82,40</b>	<b>302.049.408.508,46</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	118.492.691.806	103.349.013.245,00	87,22	86.593.891.908,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	72.765.225.337	60.274.959.998,00	82,83	50.734.206.131,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	39.602.716.469	38.897.253.247,00	98,22	31.199.327.777,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	6.124.750.000	4.176.800.000,00	68,20	4.660.328.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.984.402.489	175.544.074.255,92	79,80	214.546.452.168,46
5.1.02.01	Belanja Barang	16.518.182.444	11.483.791.288,00	69,52	24.517.546.752,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	107.849.973.145	90.839.351.797,00	84,25	113.382.665.034,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.155.010.500	810.354.981,00	70,16	5.048.249.917,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.837.966.000	7.305.228.373,00	61,71	5.470.318.026,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	52.200.000	49.200.000,00	94,25	302.423.800,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	82.571.070.400	65.036.147.806,92	78,76	65.825.248.639,46
5.1.05	Belanja Hibah	0	0,00	0,00	909.064.432,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0	0,00	0,00	909.064.432,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>338.477.094.295</b>	<b>278.893.087.500,92</b>	<b>82,40</b>	<b>302.049.408.508,46</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>111.643.126.815</b>	<b>76.532.383.290,00</b>	<b>68,55</b>	<b>71.331.589.978,83</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.451.250.611	49.553.142.376,00	62,37	43.038.739.687,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0,00	0,00	7.213.037,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.378.498.909	1.135.160.000,00	82,25	4.137.838.600,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.522.727	2.422.297,00	96,02	247.256.400,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0	0,00	0,00	332.927.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	976.617.886	852.258.857,00	87,27	4.742.007.759,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	141.580.035	136.950.000,00	96,73	468.467.061,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	51.597.313.907	41.439.791.241,00	80,31	25.343.797.379,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.091.729.079	1.470.775.038,00	70,31	5.975.023.551,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	237.282.453	207.800.000,00	87,60	1.781.401.500,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	170.844.300	168.300.000,00	98,51	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	0,00	2.787.500,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	22.854.861.315	4.099.634.943,00	17,94	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.748.084.202	25.641.327.743,00	83,39	27.066.494.791,83
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	27.171.624.228	25.032.479.499,00	92,13	26.169.919.741,83
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titi, Kontrol/Pasir	498.719.974	464.487.144,00	93,13	896.575.050,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.077.740.000	144.391.100,00	4,69	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	1.427.292.002	1.268.012.171,00	88,84	1.079.140.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	261.792.002	235.271.171,00	89,87	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.165.500.000	1.032.741.000,00	88,61	1.079.140.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.500.000	14.925.000,00	90,45	147.215.500,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perputakaan	0	0,00	0,00	3.679.500,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	0,00	124.722.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	16.500.000	14.925.000,00	90,45	19.264.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	54.976.800,00	0,00	0,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0	54.976.800,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>111.643.126.815</b>	<b>76.532.383.290,00</b>	<b>68,55</b>	<b>71.331.589.978,83</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>450.120.221.110</b>	<b>355.425.470.790,92</b>	<b>78,96</b>	<b>373.380.998.487,29</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(347.379.887.922)</b>	<b>(261.792.001.536,91)</b>	<b>75,36</b>	<b>(262.883.317.382,82)</b>

**BAB III**  
**HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI**  
**KEWENANGAN DAERAH**

**3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Bupati Tanah Laut.

**A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan strategis. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU Dinas Kesehatan berjumlah 5 indikator. IKU ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Tujuan strategis yang merupakan Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan.

IKU Dinas Kesehatan merupakan Tujuan yang paling utama dari semua program dan kegiatan bidang kesehatan yaitu:

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup.
  - b. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.
  - c. Prevelansi Stunting.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Indeks Keluarga Sehat
  - b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian ibu dibagi jumlah lahir hidup dikali 100.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		2 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Kematian bayi dibagi jumlah lahir hidup dikali 1.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		3 Prevalensi stunting	Balita Stunting dibagi balita terentry di EPPGBM dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	1 Indeks Keluarga Sehat	Jumlah keluarga dengan IKS > 0,800 dibagi dengan jumlah keluarga seluruhnya	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
		2 Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata tertimbang perunsur pelajaran dikali dengan 25	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut seperti tersaji pada tabel diatas merupakan dasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyajikan laporan kinerja pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

Kinerja Utama/Tujuan Dinas Kesehatan Nomor 1 (satu) yaitu Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat adalah meliputi pengukuran peningkatan status kesehatan masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup, Prevalensi Gizi stunting, dengan kegiatan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan pelayanan gizi pada balita, kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta pencegahan dan pengendalian penyakit, penanggungjawab Bidang Kesehatan Masyarakat serta Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan Kinerja Utama/Tujuan Dinas Kesehatan Nomor 2 (dua) yaitu Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan meliputi pengukuran Indeks Keluarga Sehat dan Indeks Kepuasan Masyarakat, kegiatannya berupa hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, akreditasi fasilitas kesehatan, pelayanan kegawatdaruratan oleh public service center (PSC), peningkatan status fasilitas kesehatan menjadi BLUD, upaya menjadikan desa dengan Indikator Keluarga Sehat (IKS) kategori sehat, pembinaan kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di desa, jaminan kesehatan kepada penduduk miskin, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan, serta pelayanan administrasi dan dukungan operasional perkantoran sesuai standar dan aturan, penanggungjawab Bagian Sekretariat, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan. Berikut Capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat			
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	≤205	50,5	10%
2	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	≤18,6	12,3	9,2%
3	Prevelensi Gizi Stunting	≤21 %	5,4%	20%

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan			
4	Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,202	25
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,9	83,242	97

#### 1. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu pada tahun 2022 sebesar 50,5 per 100.000 kelahiran hidup dimana angka tersebut diperoleh dari perhitungan yang mana pada tahun 2022 ini ada 3 kasus kematian ibu dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 5.936 orang, sehingga ditemukan hasil AKI yaitu 50,5 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut dibawah target nasional (RPJMN) yaitu sebesar 205 per 100.000 kelahiran hidup.

#### 2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi pada tahun 2022 jumlah absolut kematian bayi sebesar 73 kematian bayi dari 5.396 kelahiran hidup, yang berarti Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2022 sebesar 12,3 per 1000 kelahiran hidup (73 kematian), yang artinya masih terjadi peningkatan dibanding tahun 2021 dimana AKB sebesar 11,3 per 1.000 kelahiran hidup, serta masih diatas target sebesar 9,2 per 1000 kelahiran hidup (59 kematian) yang artinya AKB masih belum seperti yang diharapkan. Akan tetapi capaian AKB tahun 2022 sebesar 12,3 per 1.000 kelahiran hidup, masih dibawah angka target nasional (RPJMN) sebesar 18,6 per 1000 kelahiran hidup.

#### 3. Prevelansi Gizi Stunting

Prevelansi Gizi Stunting Pada tahun 2022 prevalensi stunting (TB/U) pada Balita sebesar 5.4 % dari target <21 % yaitu sebanyak 1325 orang Balita gizi stunting dari 24385 Balita yang terentry di EPPGBM. Sebaran prevalensi stunting yang terbanyak adalah di wilayah kerja Puskesmas Padang Luas sebesar 23 %, dari data ini Dinas Kesehatan dapat menentukan lokus untuk penanganan gizi stunting.

#### 4. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah 0,202 berarti masih perlu menjadi perhatian dan kerja keras dari Dinas Kesehatan untuk mencapai target yaitu 0,8. Untuk pencapaian indikator ini hanya 25%



atau termasuk kategori tidak berhasil, namun dari tabel diatas IKS Kabupaten Tanah laut menunjukkan meningkat dibanding tahun 2021 yakni 0,17 menjadi 0,202 atau meningkat 0,032.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat Dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2022 mencapai 83,242 masih berada di bawah target yaitu 85,9 atau dengan capaian sebesar 97% atau dikategorikan berhasil, dan dari pengukuran IKM selama 5 tahun, IKM Kabupaten Tanah Laut berada di angka rata-rata 83 %, dan masih berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 – 88,30.

### 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.3 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		Dinas Kesehatan		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun 8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun 8 Dokumen			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

					tersusun 4 Dokumen	tersusun 4 Dokumen			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN 12 Bulan	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN 12 Bulan			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan 24 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan 24 Dokumen			
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai			

				Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 29 Orang	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 29 Orang			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 44 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 44 Orang			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 12 Kali	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 12 Kali			

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Jenis	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Jenis			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17 Jenis	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17 Jenis			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 Jenis	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 Jenis			
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 7 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 7 Paket			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi			

					SKPD 22 Kali	SKPD 22 Kali			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan 7 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan 7 Unit			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 4 Jenis	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 4 Jenis			

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor 5 Jenis	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor 5 Jenis			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara 2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara 2 Unit			

### 3.2 Kebijakan Strategi yang Ditetapkan

1. Terdapat 4 (Empat) kebijakan strategi dalam pembangunan kesehatan di tahun 2022 yaitu :
  - a. Penurunan Angka Stunting
  - b. Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
  - c. Perbaikan pengelolaan system JKN
  - d. Penguatan Pelayanan kesehatan serta obat dan alat kesehatan
2. Kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) s.d Desember 2022

Pencegahan terhadap penyakit akan berpengaruh pada angka kesakitan dengan sendirinya juga akan mempengaruhi Angka Harapan Hidup, pelayanan pencegahan terhadap penyakit, Dinas Kesehatan telah melakukan upaya-upaya seperti pelayanan imunisasi dan vaksinasi di tahun 2022 hal ini dampak adanya pandemic COVID-19 yang mengharuskan masyarakat *Physical Distancing* dan kebijakan Bupati Tanah Laut untuk menunda kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Dinas Kesehatan juga melaksanakan pelayanan penyuluhan penyakit menular dan tidak menular dimana pencegahan penyakit sangat diutamakan, di masa pandemic COVID-19 saat ini focus utama Dinas Kesehatan adalah pencegahan dan penanganan pandemic COVID-19.

Jumlah kasus COVID-19 tahun 2020-2022 yang positif sebanyak 9.631 orang, yang sembuh sebanyak 9.381 orang dan meninggal 250 orang, yaitu :

- a. Tahun 2020 Positif 1.488 orang, sembuh 1.449 orang, meninggal 39 orang.
- b. Tahun 2021 Positif 6.620 orang, sembuh 6.433 orang, meninggal 187 orang.
- c. Tahun 2022 Positif 1.523 orang, sembuh 1.499 orang, meninggal 24 orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan berdasarkan Surat Edaran Ditjen P2P Kemenkes RI Nomor SR.01.02/C.IV/2428/2022 perihal perubahan sasaran vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut, maka setiap Fasyankes melaksanakan kegiatan vaksinasi berdasarkan juknis-juknis yang telah ditetapkan dengan jumlah sasaran yang berbeda berdasarkan kategori, tenaga kesehatan, masyarakat umum, lansia, petugas public, ibu hamil dan remaja dengan total keseluruhan sasaran adalah 308.028 sasaran. Dengan perincian penjabaran sebagai berikut :



Target	308.028	Dosis 1	263.198	85.45%
		Dosis 2	211.199	68.56%
		Booster 1	68.157	22.13%
		Booster 2	1.445	6.03%

#### Lansia

Target	22.198	Dosis 1	19.691	88.71%
		Dosis 2	13.431	60.51%
		Booster 1	4.341	19.56%
		Booster 2	19	0.09%

#### Anak-Anak

Target	38.063	Dosis 1	29.763	78.19%
		Dosis 2	21.906	57.55%

Dari cakupan vaksinasi diatas, cakupan vaksin booster belum mencapai yang diharapkan atau masih cukup rendah dari target 70%. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan kuatnya pengaruh HOAX di media social, berkaitan dengan agama dan kepercayaan dan larangan dari orang terdekat.

### 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Laporan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2022 dituangkan dalam format sebagai berikut :

Tabel 3.4 Tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanah laut

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
1	Mengoptimalkan program yang dampaknya dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi.	1. Deteksi dini resiko pada ibu hamil dengan pemeriksaan USG oleh Dokter spesialis kebidanan dan kandungan bertempat di Puskesmas.	Menekan angka / kasus kematian ibu (maternal), kematian bayi dan penurunan angka stantting.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
		2. Peningkatan kapasitas bidan dalam pelayanan ANC (Ante Natal Care). 3. Melaksanakan pengkajian AMP di Tingkat Kabupaten Tanah Laut. 4. Pemberian PMT untuk Bumil KEK. 5. Memperketat Pemantauan bayi pasca tujukan oleh Bidan Wilayah. 6. Mempersiapkan penyediaan donor darah oleh keluarga bila dilakukan tindakan untuk persalinan.	
2	Segera menempatkan tenaga medis dan paramedis di fasilitas kesehatan yang baru dibangun.	Untuk fasilitas kesehatan baru yang diresmikan di Kabupaten Tanah laut pada Tahun 2021 yaitu Puskesmas Bentok Kampung dan Puskesmas Durian Bungkok ditempatkan tenaga medis dan non medis ASN maupun Non-ASN sebagai berikut : 1) Puskesmas Bentok Kampung sebanyak 31 orang petugas terdiri dari : –Dokter Umum.....PNS 2 –Dokter Gigi .....PTT 1 –Perawat .....PNS 7 –Perawat .....PTT 2 –Bidan .....PNS 7 –Bidan .....PTT 3 –Perekam Medis .....PNS 1	Pemenuhan nakes pada fasyankes yang baru merupakan skala prioritas agar dapat beroperasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama diwilayah Kabupaten Tanah Laut.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Asisten Apoteker .....PTT 1</li> <li>-Apoteker ..... PNS 1</li> <li>-Pranata Labkes .....PNS 1</li> <li>-Tenaga Kesling .....PTT 1</li> <li>-Tenaga Kebersian .....PTT 2</li> <li>-Nutrisionis .....PNS 1</li> <li>-Jaga Malam .....PTT 1</li> </ul> <p>2) Puskesmas Durian Bungkok sebanyak 30 orang petugas terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dokter Umum .....PNS 1</li> <li>-Dokter Gigi .....PTT 1</li> <li>-Perawat .....PNS 4</li> <li>-Perawat .....PTT 6</li> <li>-Perawat gigi .....PTT 1</li> <li>-Bidan .....PNS 7</li> <li>-Bidan .....PTT 3</li> <li>-Asisten Apoteker .....PNS 1</li> <li>-Pranata Labkes .....PTT 1</li> <li>-Tenaga Kesling .....PNS 1</li> <li>-Tenaga Kebersian .....PTT 1</li> <li>-Nutrisionis .....PNS 1</li> <li>-Nutrisionis .....PTT 1</li> <li>-Jaga Malam .....PTT 1</li> </ul>	
3	Mengevaluasi kembali data peserta BPJS	Kegiatan yang sudah dilaksanakan :	Peserta yang meninggal dunia dan peserta yang

<b>NO</b>	<b>REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>	<b>TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Kesehatan yang preminya dibebankan ke APBD, sementara peserta tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemutakhiran data Peserta PBI APBD dengan menyandingkan data peserta PBI dengan Dinas Dukcapil , didapatkan data peserta yang meninggal : 1.544 jiwa dan yang pindah : 2.010 jiwa.</li> <li>2. Koordinasi dengan Dinas Sosial perihal penonaktifan peserta yang meninggal dunia dan yang pindah berjumlah 3.554 jiwa.</li> </ol>	sudah pindah dari Kabupaten Tanah Laut sudah tidak dibayarkan lagi iuran PBI nya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sejumlah : 3.554 jiwa.
4	Optimalisasi penyerapan anggaran yang berasal dari APBN seperti dana DAK Non Fisik.	Realokasi yang sebelumnya digunakan untuk pengadaan APD penanggulangan Covid-19 menjadi digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.	Untuk meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 dan Imunisasi Rutin pada Bayi dan Anak Balita.
5	Segera meningkatkan fasilitas pendukung guna meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD.	Meningkatkan fasilitas PONED di Puskesmas Kurau dan Tajau Pecah	Menanggulangi resiko kematian ibu (AKI) dan Bayi (AKB) dalam proses persalinan.

## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat.

A. Tugas Pembantuan Yang di Terima Dari Pemerintah / Pemerintah provinsi Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Program, Kegiatan dan Pelaksanaan
4. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan
6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
7. Permasalahan dan Solusi

B. Tugas Pembantuan Yang diberikan Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
4. Sarana dan Prasarana

C. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah

Laut. Dinas Kesehatan merupakan unsur pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun tugas dari Dinas Kesehatan yaitu :

- 1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas
  - e. Pembinaan UPT Dinas
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Evaluasi pengukuran kinerja tahun 2022 berdasarkan target sasaran Renstra Tahun 2022, pada umumnya dapat terealisasi semuanya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1.Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	95%	81,5%	85,8%
		2.Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	95%	91,2%	96%
		3.Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	98%	95,6%	97,5%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		4.Persentase Balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	95%	84,7%	89,1%
2	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1.Persentase Rumah Tangga berPHBS	50%	53%	106%
		2.Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1.Persentase desa STBM	84,6%	100%	120%
		2.Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	83%	105%
		3.Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	83%	119%
4	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular	100%	73,8%	73,8%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		yang dilayani sesuai standar			
		2.Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	100%	100%
		3.Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%	70%	70%
6	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1.Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	58%	0%	0%
		2.Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	100%	100%	100%
		3.Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100%	100%	100%
		4.Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	40%	0%	0%
		5.Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	52%	100%	192%
		6.Persentase penduduk miskin	100%	99,62%	90,23%



No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		yang menjadi peserta JKN			
7	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	75%	70%	80%
		2.Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	100%	71%	100%
		3.Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	92 %	92%	100%
		4.persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100 %	90%	90%
8	Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1.Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100%
		2.Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	89%	89%	100%
		3.Persentase Pelayanan	100%	100%	100%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		Kepegawaian sesuai aturan			
		4.Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%	100%
		5.Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100%
		6.Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	73	81,30	111,36

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal antara lain:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan, serta dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama dan sasaran strategis bidang kesehatan.
2. Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas Program perlu ditingkatkan untuk pencapaian kinerja yang optimal.
3. Melakukan inovasi anggaran dan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku di masa pandemi covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir untuk terus memberikan dan meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat serta mencapai target indikator kinerja utama dan sasaran strategis Dinas Kesehatan untuk mendukung keberhasilan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
4. Mendukung dan mensukseskan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur Pasca Bencana dan Pemenuhan Target-Target Indikator RPJMD khususnya Bidang Kesehatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 adalah merupakan bagian dari laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan, tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan. Selain merupakan kewajiban perundang-undangan, maka tujuan pokok penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban SKPD Dinas Kesehatan yang merupakan perangkat daerah adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2022.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, dapat disimpulkan bahwa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 cakupan dan realisasi serta pencapaian target Dinas Kesehatan dinilai cukup baik khususnya penanggulangan dan pengendalian penyakit menular yang menjadi perhatian khusus bagi Negara termasuk penyelesaian target vaksinasi yang melebihi target Nasional 70% dari jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut secara kelembagaan unit kerja yang ditangani dan dikelola sebanyak 26 Unit Kerja yaitu : Dinas Kesehatan sebagai induk SKPD ditambah 2 UPT. RSUD dan 22 UPT Puskesmas yang tersebar diseluruh kabupaten tanah laut termasuk 2 UPT lainnya yaitu UPT Labkesda dan UPT IFK.

2. Terkait Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 untuk pencapaian target dan realisasi keuangan berdasarkan data laporan realisasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD unaudit untuk pencapaian target pendapatan terealisasi sebesar 91,14% dari target pendapatan dan pencapaian target belanja

terrealisasi sebesar 78,96% dari target belanja sehingga dapat disimpulkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah laut termasuk dalam kategori baik.

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 2022 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan urusan Bersama dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini disampaikan untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan dapat digunakan sebagai Dokumen pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2022.

Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kesempurnaan yang ada didalam laporan ini untuk itu kami mengharapkan masukan demi kesempurnaan dari isi Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.